

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH, PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
(Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)

Oleh :
Dina Afrina
Pembimbing :Ria Nelly Sari dan Lila Anggraini

Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : dinna.afrina@gmail.com

*The Effect Of Implementation local government accounting system, Internal
control and reporting system at the accountability
of public institutions.*
(Study in the SKPD's Of Pekanbaru City)

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of the implementation local government accounting system, internal control and reporting system at the accountability of public institutions. This study were conducted at government agencies of Pekanbaru city. The population at this study were employed who worked in the Pekanbaru city. The sampling method used in this study is purposive sampling method. The respondent in this study is the head of SKPD, the head of financial and staff financial. The sample used in this study were 90 respondents. The hypotheses then tested is multiple linear regression analysis by using SPSS version 20.0. The result of this study indicated that the implementation local government accounting system, internal control and reporting system has significantly effect on performance accountability of public institutions. The magnitude of the effect (R^2) the implementation local government accounting system, internal control and reporting system on the performance accountability of public institutions was 63,5%. While the remaining 36,5% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.

Keywords: accounting system, internal control, reporting, and accountability

PENDAHULUAN

Di Indonesia Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Peraturan perundang – undangan ini mengakibatkan dua implikasi strategis kepada daerah (Harun, 2008). Pertama, situasi desentralisasi politik dan keuangan telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program

hingga aktivitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, kedua, pemerintah daerah telah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk mendapatkan, mengelola dan mengalokasikan dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintahan yang ada dilingkungan daerah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara yang diamanatkan kepada mereka.

Kinerja pemerintahan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri. Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga berdampak pada perlunya pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik (Soetjipto dan Sudikdiono, 211: 15 dalam Fitriadi 2013). Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantarno dan Azlina, 2011).

LHP atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kota Pekanbaru pada tahun – tahun sebelumnya. Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak atas penyajian saldo piutang retribusi, saldo investasi permanen, dan saldo aset tetap, dalam semua hal yang material, untuk posisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru per 31

Desember 2013, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Opini WDP yang diberikan oleh BPK tersebut diberikan untuk dampak sebagai berikut, (1) Piutang Retribusi. Penyajian Piutang Retribusi dalam Neraca per 31 Desember 2013, diantaranya merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB). Sebagian nilai Piutang Retribusi IMB tersebut tidak didasarkan kepada pengawasan/pemeriksaan fisik, tidak didukung dengan bukti yang memadai dalam perhitungan dan penetapan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2013 tersebut; (2) Investasi Permanen. Penyajian Investasi Permanen dalam Neraca per 31 Desember 2013 merupakan penyertaan modal pada enam BUMD yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (3) Aset Tetap. Penyajian sebagian nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2013 tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai tentang rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi dan nilai perolehan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap per 31 Desember tersebut. Permasalahan tersebut telah menjadi pengecualian pada opini BPK atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2009,

2010, 2011, dan 2012, namun Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain hal – hal tersebut diatas, pada Buku II BPK RI menemukan menyajikan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah (1) Persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru Menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Belum Memadai; (2) Penatausahaan Kas Umum Daerah Tidak Sesuai Dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Trans Metro Pekanbaru (BLUD TMP) Belum Sesuai Dengan Ketentuan; (4) Pengelolaan Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Tidak Memadai; (5) Pemerintah Kota Pekanbaru Belum Melakukan Validasi atas Piutang BPHTB dan PBB secara optimal; (6) Nilai Piutang Retribusi IMB Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; (7) Nilai Investasi Non Permanen Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; (8) Nilai Aset Tetap Sebagian Belum Didukung Dengan Dokumen Sumber Yang Memadai dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; (9) Revitalisasi Atas Bangunan di Tiga SKPD Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Nilai Aset Pada Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru Disajikan Overstated; (10) Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Belum Memadai.

Permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Kekurangan Penerimaan Bunga Deposito Pemerintah Kota Pekanbaru; (2) Sisa UYHD TA 2013 Terlambat Disetorkan Ke Kas Daerah; (3) Dasar Hukum Penyertaan Modal Pemerintah

Kota Pekanbaru Tahun 2013 Kepada BUMD Sudah Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan; (4) Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Dapat Diterapkan dan Terdapat Potensi Pendapatan serta Denda Atas Retribusi Izin Trayek; (5) Terdapat Denda Keterlambatan Atas Empat Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum; (6) Pemberian Belanja Subsidi kepada PD Pembangunan Tidak Sesuai Ketentuan; (7) Bantuan Hibah Kepada Organisasi/Kelompok Masyarakat Belum Dipertanggungjawabkan dan Tidak Sesuai Ketentuan; (8) Terdapat Belanja Bantuan Sosial Belum Sesuai Peruntukan, Tidak Sesuai Ketentuan, dan Belum Dipertanggungjawabkan; dan (9) Pekerjaan Infrastruktur Pedesaan pada Kegiatan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Tersebar di 12 Kecamatan oleh Dinas Pekerjaan Umum Belum Dapat Dimanfaatkan.

Indikator keberhasilan yang telah dirumuskan dan ditetapkan targetnya diukur kinerjanya seobjektif mungkin meskipun masih ditemukan berbagai kendala. Diantaranya dalam proses pengumpulan data kinerja ternyata bukan merupakan hal yang mudah, di samping harus mengolah sistem data kinerja yang ada di masing-masing SKPD, kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola perubahan. Untuk itu disadari bahwa pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang baik sangat diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintah Kota Pekanbaru, serta dapat memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan amanah

yang diberikan kepada pemerintah Kota Pekanbaru (Lakip Kota Pekanbaru).

Akhirnya, hasil evaluasi pencapaian sasaran terhadap 41 (empat puluh satu) sasaran meliputi 4 (empat) sasaran atau 9,7 % kategori sangat memuaskan, 12 (dua belas) sasaran atau 29,3 % kategori sangat baik, 6 (enam) sasaran atau 14,6 % kategori baik, 2 (dua) sasaran atau 4,9% kategori sedang dan 17 (tujuhbelas) sasaran atau 41,5 % kategori kurang baik.

Oleh karena itu pemerintah Kota Pekanbaru berupaya mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meniyasati berbagai permasalahan dan kendala yang ada, guna tercapainya kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya (LAKIP Kota Pekanbaru).

Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja

atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomilainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Dengan demikian, maka pemerintah akan menerapkan basis akrual paling lambat pada tahun 2015.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, untuk menunjang akuntabilitas kinerja yang bagus juga diperlukan adanya pengendalian intern yang baik. Menurut Rahman (2012), Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan/fraud.

Berdasarkan temuan BPK Kota Pekanbaru tahun 2013 terdapat masalah kelemahan terhadap sistem pengendalian internalnya. Dalam temuan itu disebutkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal, yaitu: (1) Persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru Menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Belum Memadai; (2) Penatausahaan Kas Umum Daerah Tidak Sesuai Dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Trans Metro Pekanbaru (BLUD TMP) Belum Sesuai Dengan

Ketentuan; (4) Pengelolaan Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Tidak Memadai; (5) Pemerintah Kota Pekanbaru Belum Melakukan Validasi atas Piutang BPHTB dan PBB secara optimal; (6) Nilai Piutang Retribusi IMB Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; (7) Nilai Investasi Non Permanen Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; (8) Nilai Aset Tetap Sebagian Belum Didukung Dengan Dokumen Sumber Yang Memadai dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; (9) Revitalisasi Atas Bangunan di Tiga SKPD Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Nilai Aset Pada Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru Disajikan Overstated; (10) Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Belum Memadai.

Disamping itu, untuk mendukung terciptanya pertanggungjawaban kinerja yang baik, perlu adanya sistem pelaporan. Sistem pelaporan diperlukan agar dapat memudahkan memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Anthony (2005), sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.

Eko Setiawan (2013), meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kabupaten Pelalawan. Hasilnya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sedangkan variabel sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil-hasil Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013), dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kabupaten Rokan Hulu. Hasil menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ariessa Permata Bowta (2013) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen dan lokasi penelitian.

Rumusan permasalahan yang akan diteliti, adalah: 1) apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?, 2) apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? 3) apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?

Adapun tujuan penelitian adalah: 1) untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2) untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 3) untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic (LAN, 2003).

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 yakni: "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan, atau transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Abdul Halim 2007 : 77 dalam Ariessa 2012).

Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu cara untuk

mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan/fraud (Rahman, 2012).

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah 2005 dalam Wahyuni 2013).

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 yakni: "Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan, atau transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Abdul Halim 2007 : 77).

Jadi ada keterkaitan antara sistem akuntansi pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya suatu rangkaian prosedur yang tersistematis dalam rangka mempertanggungjawabkan APBD nya maka akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan tingkat pencapaian

kinerja/pertanggungjawaban kinerja atas kegiatan yang telah tersusun didalam perencanaan strategis suatu instansi.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₁ : Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan/fraud. pengendalian intern mempunyai pengaruh dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya pengendalian yang bersifat terus menerus atas kegiatan yang berada dibawah pengawasan pimpinan (intern) maka, akan terciptanya tujuan organisasi yang semestinya, efektif dan efisien serta berpotensi dalam mengarahkan sebuah instansi pada pencapaian kinerja yang optimal atas pengendalian yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran juga akan mengalami peningkatan.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₂ : Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010). Jadi, dengan adanya laporan yang menjadi gambaran pertanggungjawaban bawahan kepada atasan maka akan memudahkan dalam menggambarkan tingkat pencapaian kinerja/pertanggungjawaban kinerja pemerintah

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₃: Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah

teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kasubag Keuangan, dan Staf Keuangan.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 90 orang dari 30 SKPD yang masing-masing SKPD ada 3 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara memberikan kuesioner kepada pihak yang menjadi responden.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel dependen

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja diukur dengan 4 indikator yaitu, sumber daya organisasi telah diperoleh, dilindungi dan digunakan secara hemat dan efisien, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

kesesuaian antara program atau kegiatan dengan visi misi, dampak seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat.

Variabel Independen

Penelitian menggunakan tiga variabel independen yaitu :

a. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (X_1) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Juanita Fatmala, 2014). Indikator Pengukuran Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah pencatatan, penggolongan dan pelaporan.

b. Pengendalian Intern

Variabel pengendalian intern (X_2) adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan/fraud (Rahman, 2012). Indikator pengukuran pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

c. Sistem Pelaporan

Variabel Sistem Pelaporan (X_3) adalah sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan system pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada

atasan (kepala bagian anggaran).Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005 dalam Wahyuni 2013). Ada 3 indikator yang digunakan dalam pengukuran sistem pelaporan yaitu penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil serta lamanya waktu koreksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dalam rangka keperluan penelitian, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Dengan mengambil masing-masing 3 responden pada setiap SKPD yaitu Kepala SKPD, Kasubag.Keuangan, dan Staf Keuangan.

Kuesioner dikirim sebanyak 90 kuesioner dan yang kembali sebanyak 87 kuesioner (96,67%). Kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 0 kuesioner (0%). Sehingga kuesioner yang dapat digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah 87 kuesioner (96,67%).

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian yang bertujuan untuk mempermudah memahami data. Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,

Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Statistik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	87	16.2989	1.67134
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	87	37.2069	3.86438
Pengendalian Intern (X2)	87	38.6092	5.73516
Sistem Pelaporan (X3)	87	16.2299	1.75672
Valid N (listwise)	87		

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Nilai rata-rata keempat variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai *Correlated Item – Total Correlation*. Nilai *r* hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai *r* tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Pada penelitian ini diperoleh $df = 187 - 2 = 85$ dengan tingkat signifikan 5%. Nilai *r* tabel dengan derajat bebas (*df*) 85 adalah 0,2108

Dari hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 20.0 ketahuilah bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dari tabel tersebut terbukti bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya dalam penelitian ini.

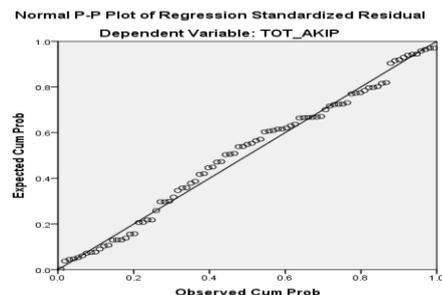
Hasil Uji Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas data dengan *P-P Plot* untuk variabel dependen (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1
Normal P-P Plot
Regression Standardized Residual



Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Nilai Tolerance dan VIF

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	0,676	1,479
Pengendalian Intern (X2)	0,685	1,459
Sistem Pelaporan(X3)	0,695	1,439

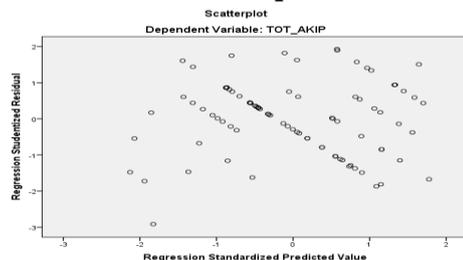
Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa ketiga variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah *di-studentized*. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2
Scatterplot



Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar

secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Variabel independen	Durbin-Watson	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah(X1), , Pengendalian Intern (X3) Sistem Pelaporan (X3)	1,663	Tidak ada autokorelasi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber : data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* pada variabel independen dan variabel dependen menunjukkan nilai 1,663. Dengan demikian, nilai *Durbin-Watson* berada di antara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel independen.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.959	1.223	
1 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)	.089	.035	.205
Pengendalian Intern (X2)	.165	.023	.568
Sistem Pelaporan (X3)	.164	.076	.172

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 3,959 + 0,089X_1 + 0,165X_2 + 0,164X_3 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015:97).

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.635	.622	1.02824

a. Predictors: (Constant), sistem pelaporan, pengendalian intern, psap

b. Dependent Variable: AKIP (Y)

Sumber: data olahan SPSS 20, 2015

Dari tabel 5 diperoleh nilai R sebesar 0,797 atau 79.7%. Sedangkan nilai R Square sebesar 0,635 atau 63.5%. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Pekanbaru dapat

dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan sebesar 63.5%. Sedangkan sisanya sebesar 36.5% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Hasil pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas /independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98).

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		3.237	.002
1 Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (X1)	.205	2.541	.013
Pengendalian intern (X2)	.568	7.081	.000
Sistem Pelaporan (X3)	.172	2.160	.034

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya t hitung adalah 2,541 sedangkan nilai t tabel

adalah 1,989. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,013 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($2,541 > 1,989$) dan $sig. 0,013 < 0,005$.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Pekanbaru akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena tujuan penerapan sistem akuntansi pemerintah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kerjanya. Jadi, dengan adanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fatmala (2014) dan Bowta (2013) yang menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya t_{hitung} adalah 7,081 sedangkan nilai t_{tabel} adalah 1,989. Kemudian nilai

signifikansinya adalah 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($7,081 > 1,989$) dan $sig. 0,000 < 0,05$.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa pengendalian intern dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada hakikatnya anggaran dapat disusun dengan jelas apabila pengendalian intern yang diperlukan memadai. Pengendalian intern yang diterapkan bukanlah maksud untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan, akan tetapi pengendalian intern yang efektif akan menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Dengan adanya pengendalian intern didalam suatu pemerintahan, maka akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik. Sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai untuk melindungi kekayaan pemerintah dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja instansi pemerintah dan tentu saja akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Primayoni (2014) yang membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya t hitung adalah 2,160 sedangkan nilai t tabel adalah 1,989. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,034 dengan taraf signifikansi 0,05. Sehingga $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ ($2,160 > 1,989$) dan $\text{sig. } 0,034 < 0,05$.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah kota Pekanbaru. Jadi, sistem pelaporan yang baik dapat memantau dan mengendalikan kinerja aparat dalam mengimplementasikan anggaran yang ditetapkan. Sistem pelaporan yang dilakukan semakin baik atau besar, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) yang membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin baik sistem akuntansi yang diterapkan maka

akan semakin baik juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Nilai R square (R^2) sebesar 0,635 (63,5%) ini menerangkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan sebesar 63,5 %.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagi pemerintah Kota Pekanbaru, agar lebih meningkatkan penerapan atas sistem akuntansi yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus lebih meningkatkan efektifitas pengendalian intern agar akuntabilitas kinerja juga akan semakin baik, dan sistem pelaporan yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik untuk masa mendatang.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas ruang lingkup penelitian dan penambahan

responden yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. 2005. *Management control system*. Jakarta: Salemba Empat
- Fitriadi, Maikel, 2013. Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Kota Pekanbaru). *Skripsi*. Universitas Riau.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- LAN dan BPK. 2003. Pedoman penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akip. Jakarta
- Permata, Ariessa. 2013. Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada provinsi Gorontalo). *Jurnal online*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Riantiarno, Azlina, 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal online*. Universitas Riau.
- Setiawan, Eko, Andreas, Rusli. 2013. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Kabupaten Pelalawan). *Jurnal online*. Universitas Riau.
- Wahyuni, Raja, Enni, 2013. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Kabupaten Rokan Hulu).e-*Jurnal online*. Universitas Riau.
- www.pekanbaru.bpk.go.id